



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSTAN TARAKKA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMITRAAN, RISET, INOVASI, DAN ALUMNI**
3. NHK : **870844**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.979.890.975**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.202.377.275
2. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 597.545.100
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 329.528.600
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 850.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.194.350**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 130.501.600
2. MOTOR, YAMAHA SE88 / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.523.600
3. MOTOR, YAMAHA B5D A/T SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.098.450
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T GR SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 105.070.700

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 46.590.700**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 402.624.846**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.679.300.871

III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.489.300.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.